

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah yang begitu cepat telah memacu perkembangan produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat, disamping memberikan alternatif kepada perbankan konvensional. Sebelum tahun 1997, produk perbankan syariah terbatas kepada giro, tabungan dan deposito pada sisi penghimpunan dana, sedangkan pada sisi pembiayaan hanya dua produk yang sering digunakan yaitu *bai' bi tsaman ' ājil (muḍarabah)* dan *murābahah* (jual beli). Yang pertama digunakan untuk pembiayaan investasi, sedangkan yang kedua diterapkan untuk membiayai modal kerja.¹

Murābahah dalam konsep fiqih adalah jual beli pada harga awal (pokok) dengan tambahan keuntungan. Artinya penjual memberitahukan kepada si pembeli berapa harganya dan berapa keuntungan yang diperoleh si penjual, baik secara *lumpsum* ataupun secara terinci. *Murābahah* dikenal dalam fiqih sebagai salah satu dari *bay al'amānah*, karena jual beli yang terjadi berdasarkan kepercayaan

¹ Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam*, Cetakan 1, (Tangerang Selatan Banten: Shuhuf Media Insani, 2011), hlm. 71.

kepada penjual yang menjelaskan tentang harga beli terhadap barang tersebut.²

Baitul Māl wat-Tamwīl (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan syari'ah yang memiliki perkembangan cukup pesat pada saat ini. Secara bahasa *baitul māl* berarti rumah usaha. *Baitul māl* pada masa Nabi Muhammad dahulu berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial. Sedangkan *Baitul Tamwīl* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.³

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien, maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus memenuhi keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka.

Di Desa Wirun Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo sendiri masih minim pengetahuan tentang lembaga keuangan syari'ah, masih banyak yang menganggap bahwasannya meminjam ke lembaga keuangan atau koperasi itu berat dan susah. Maka BMT Sakinah Bekonang mendirikan lembaga keuangan atau koperasi dengan berbasis syari'ah, sehingga banyak masyarakat awam atau masyarakat yang kurang mampu dapat berfikir positif akan hal ini. Karena di sekitar Bekonang banyak masyarakat yang kurang mampu dan berwirausaha sendiri,

² *Ibid*, hlm. 73.

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil*, (Yogyakarta: UII Perss, 2004) hlm. 126.

terciptalah ide atau gagasan supaya dapat meringankan masyarakat dengan wawasan hukum Islam dan pelayanannya yang baik.

Salah satu produk dalam sistem kerja BMT Sakinah ini terdapat dalam pembiayaan (*lending*). Program pembiayaan di sini mencakup seperti pembiayaan renovasi rumah, sepeda motor, dan barang elektronik, dan di sini peneliti akan membahas pembiayaan sepeda motor dan barang elektronik. Di dalam pembiayaan, BMT Sakinah telah menetapkan margin pembiayaan *murābahah* yang didapatkan setiap pembayaran yang dilakukan, sehingga ini bisa dinamakan kredit yang memiliki nilai keuntungan sendiri. Contoh: anggota (nasabah) meminjam pembiayaan motor 5 juta rupiah ke BMT Sakinah dengan menggunakan DP 1 juta rupiah dan menggunakan jaminan BPKB motor atau sertifikat rumah.

DSN MUI dalam fatwanya menyatakan, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah margin keuntungan. Dalam kaitan ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan.⁴

Margin minimal dari sebuah perniagaan kebutuhan pokok rata-rata berkisar antara 5%-10%, namun untuk komoditi tertentu margin

⁴ Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Ciracas, Jakarta), hlm. 60.

bisa sampai 40%. Bandingkan dengan tingkat margin yang dipatok oleh BMT maksimal 3%, bahkan di institusi perbankan margin tersebut bisa lebih rendah lagi yaitu dibawah 2%.⁵

Mengingat posisi BMT Sakinah yang strategis dalam meningkatkan perekonomian dan modernisasi golongan ekonomi lemah khususnya, maka kehadiran BMT diharapkan dapat memenuhi misi pemerintah, yaitu memenuhi pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan dan golongan ekonomi lemah. Karena jangkauan pelayanan yang selama ini dilakukan oleh Bank Umum masih terbatas pada daerah perkotaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang sistem perhitungan pembiayaan khususnya *murābahah*, dimana akad jual beli tersebut merupakan akad yang paling banyak digunakan pada lembaga keuangan syari'ah saat ini. Penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk skripsi yang berjudul *“Sistem perhitungan pembiayaan murābahah dalam pandangan hukum ekonomi syariah (studi kasus BMT Sakinah Bekonang)”*.

⁵ Ahmad Mustofa, dkk, *Reorientasi Ekonomi Syariah*, Cetakan pertama, (Yogyakarta: UII Press : 2014), hlm. 194.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian tentang *bagaimana sistem perhitungan pembiayaan murābahah dalam pandangan hukum ekonomi syariah (studi kasus BMT Sakinah di Bekonang)*.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui analisis sistem perhitungan pembiayaan *murābahah* dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah studi kasus BMT Sakinah Bekonang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritik, yaitu:

- 1) Untuk menambah keilmuan, terutama dalam analisis sistem perhitungan pembiayaan *murābahah* yang diterapkan di BMT Sakinah Bekonang.
- 2) Supaya BMT Sakinah dapat menerapkan pembiayaan *murābahah* secara syari'ah dan mempertahankan anggota (nasabah) yang sudah ada.
- 3) Dapat dijadikan pedoman dan informasi bagi masyarakat umum.

b. Manfaat praktis, yaitu

- 1) Memberikan pembelajaran untuk masyarakat luas tentang ilmu ekonomi.
- 2) Memberikan gambaran umum tentang lembaga keuangan yang lainnya, sehingga dapat dijadikan pembelajaran kepada pelaku bisnis atau kepada BMT Sakinah Bekonang.